

Judul : Tol japek jadi Mohammed Bin Zayed, Bandung-Jakarta lancar via Abu Dhabi
Tanggal : Kamis, 15 April 2021
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Tol Japek Jadi Mohammed Bin Zayed, Bandung-Jakarta Lancar Via Abu Dhabi

Pemerintah mengubah nama Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II Layang menjadi Tol Sheikh Mohammed Bin Zayed (MBZ).

Pergantian nama diresmikan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Senin (12/4).

Menurut Pratikno, penamaan tol itu untuk menghargai dukungan MBZ terhadap Indonesia

hingga saat ini. MBZ yang merupakan Putra Mahkota dan Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Darat Uni Emirat Arab (UEA), disebut sebagai salah satu investor terbesar di Indonesia. Salah satu sumbangsinya adalah saat pembentukan Indonesia Investment Authority (INA).

"Kami sampaikan pula, nama jalan Presiden Joko Widodo juga telah dicanangkan di Abu Dhabi. Itu jalan utama yang strategis. Antara

Abu Dhabi National Exhibition Center ke arah kompleks kedutaan," kata Pratikno dalam peresmian nama Tol MBZ.

Penggunaan nama MBZ mendapat respons beragam. Di media sosial pun ramai dibahas. Banyak pertanyaan, kenapa nama pemimpin negara lain yang ditetapkan sebagai nama jalan.

Misalnya saja Anggota Komisi VI DPR dari Partai Demokrat Herman Khaeron. Di akun

Twitter miliknya @akang_hero, dia menyindir penggunaan nama tersebut. "Alhamdulillah, perjalanan Bandung-Jakarta lancar melalui jalan tol Abu Dhabi," tulisnya.

Sedangkan Anggota Komisi VI DPR dari PDIP Damadi Duriyanto, termasuk yang mendukung perubahan nama Tol Japek menjadi Tol MBZ. Untuk membahas topik ini lebih lanjut, berikut wawancara dengan Herman Khaeron dan Damadi Duriyanto.

HERMAN KHAERON

Anggota Komisi VI DPR

Akan Banyak Nama Jalan Yang Tak Dikenal Rakyat

Bagaimana pandangan Anda mengenai perubahan nama tol layang Jakarta-Cikampek menjadi Mohammed Bin Zayed?

Pemberian nama jalan, itu domainnya pemerintah. Alasan perubahan nama itu merupakan bagian dari diplomasi, sah-sah saja. Tapi, nama investor dijadikan nama jalan tol, itu di luar kelaziman saat ini.

Hanya di luar kelaziman, berarti tidak masalah dong?

Mungkin saja, ke depan akan banyak nama jalan yang tidak kenal masyarakat Indonesia.

Anda khawatir akan banyak nama jalan yang diubah memakai nama investor?

Iya, mungkin saja nama pengembang atau investor akan dipakai lagi untuk mengganti nama-nama jalan yang lain.

Bukankah itu tidak dilarang?

Seluruh pembangunan di negeri ini, sesungguhnya dari uang rakyat.

Bagaimana seharusnya memilih nama jalan?

Biasanya, nama jalan merujuk pada tokoh yang telah berjasa dan berkorban untuk negeri ini. Bukan



diambil dari nama investor atau pengembang.

Nama investor dijadikan nama tol itu janggal ya?

Iya, aneh, jalan tol layang terpanjang pertama di Indonesia, diberi nama pemimpin negara lain.

Apakah penggantian nama tol itu perlu dievaluasi?

Sebaiknya, ada diskusi yang komprehensif untuk membahas masalah

ini. Supaya, pemberian nama jalan ada aturan dan dasarnya.

Bukankah pemberian nama itu akan menambah minat investor berinvestasi ke Indonesia?

Investasi pada akhirnya dibayar pakai uang rakyat juga. Kenapa saya menyebut rakyat, karena seluruh pembangunan di negeri ini sesungguhnya dari uang rakyat. Pembangunan Tol Japek, juga dibayar dengan uang rakyat.

Daya minat investasi, bukan karena ada imbal jasa pemberian nama jalan.

Karena apa dong?

Daya minat investasi itu, ditentukan kepastian usaha, stabilitas politik, keamanan, penegakan hukum dan market.

Jadi, pemberian nama Tol Mohammed Bin Zayed itu tidak tepat ya?

Sekali lagi saya katakan, alasan pemerintah sah-sah saja. Tetapi, di luar kelaziman saat ini. Mungkin saja akan banyak nama jalan yang tidak dikenal rakyat pada masa akan datang. Karena, mungkin akan banyak nama pengembang atau investor dipakai sebagai nama jalan. ■ NNM

DARMADI DURIANTO

Anggota Komisi VI DPR

Dalam Dunia Bisnis, Itu Sesuatu Yang Boleh Saja

Bagaimana pandangan Anda mengenai perubahan nama Tol Japek menjadi Tol Sheikh Mohamed Bin Zayed (MBZ)?

Ini adalah dampak dari Undang-Undang Cipta Kerja mengenai pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA).

Sekarang, permasalahan kita adalah kekurangan dana untuk membangun tol, jembatan, dermaga dan sebagainya. Masih banyak jalan tol yang membutuhkan dana.

Contohnya?

Contohnya Jalan Trans Sumatera, Hutama Karya (BUMN) masih butuh Rp 66 triliun untuk menyelesaikan jalan tol ini. Belum lagi yang lain-lain. Maka, dalam Undang-Undang Cipta Kerja, dibentuk LPI yang kemudian dinamakan dengan INA.

Penamaan Tol MBZ itu konsekuensi dari upaya menarik investasi?

Iya, ini bertujuan untuk menarik investor. Tentu selain berinvestasi, investor meminta namanya diabadikan juga. Ini juga konsekuensi pembentukan lembaga pengelola dana investasi.

Dalam perhitungan dunia bisnis, itu sesuatu yang boleh-boleh saja. Tentu ada plus minusnya. Kalau ada nama yang dipakai, tentu Indonesia akan mendapatkan sesuatu juga. Sehingga kita harapkan, itu menjadi salah satu pemanis bagi investor-investor lainnya untuk masuk ke Indonesia.

Tapi, penamaan ini memicu polemik di masyarakat...

Sejauh yang saya lihat, penamaan Tol Japek menjadi nama Pangeran Uni Emirat Arab (UEA) ini tidak ada masalah. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat. Yang saya lihat, penamaan ini tidak ada kontra di masyarakat.

Bagaimana sebaiknya menyikapi hal ini?

Saya kira, itu sebagai salah satu pemanis agar investor-investor lain berani masuk. Wajar, para investor



ingin mendapatkan sesuatu juga. Pemberian nama itu dilihat dan dikenang masyarakat Indonesia. Jadi, salah satu *selling point* yang bisa dijual kepada investor, sejauh tidak menimbulkan kontra. Kalau kontra, maka harus dihindari.

Penamaan ini, bukan berarti tol itu berubah pemiliknya?

Nama itu sampai dipakai Pemerintah Indonesia, tentu ada pemanisnya. Ada benefitnya. Masak nama dari luar negeri dipakai, tapi tidak ada benefitnya. Saya pikir, Pemerintah Indonesia sudah menghitung dengan baik cost benefitnya. Tentu tidak ada cost-nya, tidak ada kontranya, sepanjang ini tidak ada yang ribut. Tapi benefitnya pasti sudah ada, berupa investasi yang ditambah karena memakai nama tersebut.

Penamaan ini strategi menarik investasi saja?

Bagi tokoh sekelas Pangeran Uni Emirat Arab, namanya sampai dipasang, merupakan kebanggaan juga. Sama kayak nama Soekarno yang dipasang di Rusia, itu kebanggaan juga bagi Indonesia. Apalagi, kalau ada nilai tambah dalam bentuk in-

vestasi. Saya pikir, ini perhitungan bisnis yang saling menguntungkan dua belah pihak.

Pangeran Uni Emirat Arab ini bawa apa ke Indonesia?

Uni Emirat Arab penting karena investasi dananya. Janji awalnya, 5 miliar Dolar AS. Ada tambahan 5 miliar lagi kalau nggak salah, sehingga menjadi 10 miliar Dolar AS. Artinya, dari awal pembahasan pembentukan LPI, pemerintah sudah diberitahu, ada komitmen 5 miliar Dolar AS yang akan masuk dari Dubai atau Emirat Arab. Tol itu kemudian dijadikan aset untuk membentuk tata kelola, sehingga kita bisa membangun tata kelola yang bagus. Ini juga menyelesaikan masalah masyarakat. Ada benefitnya juga buat masyarakat. Sehingga, kita bisa melihat bahwa ini *win-win solution*. Pihak sana mendapatkan keuntungan, plus namanya ikut dipajang. Sedangkan kita bisa membangun untuk kepentingan masyarakat.

Harapan Anda terhadap investasi ini?

Tentu ini salah satu point untuk menarik investor masuk, dengan memberikan tambahan berupa pemakaian nama. Ini bisa dimanfaatkan untuk proyek-proyek lain yang bisa dijalankan Pemerintah Indonesia. Tentu harapannya, tata kelola INA harus transparan. INA harus menciptakan tata kelola yang baik. Kalau tidak ada tata kelola yang baik, maka akan terjadi korupsi, hengk-pengki. Ini harus dihindari. INA harus bisa menciptakan image baik, bahwa pembentukannya bukan menyengsarakan rakyat dengan adanya korupsi. Tapi, INA akan memberikan penambahan *multiplier effect* dalam bidang ekonomi.

Apa yang harus dicapai INA?

Ada dua hal yang harus dicapai. *Financial rate of return* dan *economic rate of return*. Tentu return of investment harus bagus, keuntungannya ada. Juga, harus ada penambahan economic rate of return. ■ KAL